

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2017

Tema RKP Tahun 2017 adalah “memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”. Sesuai dengan tema tersebut, maka sasaran pembangunan Tahun 2017 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1%;
2. Pengangguran sebesar 5,0% – 5,3 %;
3. Angka kemiskinan sebesar 8,5 %- 9,5%;
4. Gini ratio sebesar 0,38;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7

Pencapaian sasaran pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 terkait dengan sasaran pembangunan nasional Tahun 2017, sebagai berikut :

NO	SASARAN	PENCAPAIAN 2017
1	Pertumbuhan ekonomi	6,22%
2	Pengangguran sebesar	7,14%
3	Angka kemiskinan	3,78%
4	Gini ratio	0,41%
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,60

Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017 terdiri dari :

1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi :
 - a. Revolusi Mental, dengan program prioritas :
 - 1) Reformasi birokrasi pemerintahan,
 - 2) Penegakkan hukum dan kelembagaan politik,
 - 3) Kemandirian ekonomi dan daya saing bangsa,
 - 4) Peneguhan jati diri dan karakter bangsa, dan
 - 5) Daya rekat sosial dalam kemajemukan.
 - b. Kesehatan, dengan program prioritas :
 - 1) Penguatan upaya promotif dan preventif “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”,
 - 2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan,
 - 3) Perbaikan gizi masyarakat dan
 - 4) Peningkatan pelayanan KB dan kesehatan produksi.
 - c. Pendidikan, dengan program prioritas :
 - 1) Penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata,
 - 2) Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan,
 - 3) Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif,
 - 4) Pengembangan pembelajaran yang berkualitas,
 - 5) Peningkatan pendidikan agama dan oendidikan karakter,

- 6) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas,
 - 7) Penguatan kelembagaan perguruan tinggi,
 - 8) Peningkatan kapasitas iptek, inovasi, dan daya saing perguruan tinggi, dan
 - 9) Peningkatan relevansi pendidikan.
 - d. Perumahan dan Permukiman, dengan program prioritas :
 - 1) Fasilitasi penyediaan hunian layak baru,
 - 2) Fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh),
 - 3) Penyediaan akses air minum dan sanitasi, dan
 - 4) Peningkatan ketersediaan air baku.
2. Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi :
- a. Kedaulatan pangan, dengan program prioritas :
 - 1) Peningkatan, mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat,
 - 2) Peningkatan produksi padi dan pangan lain,
 - 3) Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat dan,
 - 4) Penanganan gangguan terhadap produksi pangan.
 - b. Maritim dan kelautan, dengan program prioritas :
 - 1) Konektivitas (tol) laut dan industri maritim,
 - 2) Industri perikanan dan hasil laut,
 - 3) Tata ruang laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut serta wisata bahari,
 - 4) Kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam,
 - 5) Penanggulangan dan penyelesaian IUU *fishing* dan keamanan laut,
 - 6) Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau – pulau kecil.
 - c. Kedaulatan energi, dengan program prioritas :
 - 1) Peningkatan peranan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi,
 - 2) Peningkatan aksesibilitas energi,
 - 3) Pengembangan cadangan energi,
 - 4) Penyediaan energi primer,
 - 5) Efisiensi dan konservasi energi, dan
 - 6) Pengelolaan subsidi energi yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran.
 - d. Pembangunan pariwisata, dengan program prioritas :
 - 1) Promosi wisata Indonesia,
 - 2) Pengembangan 10 destinasi wisata,
 - 3) SDM dan kelembagaan pariwisata,
 - 4) Layanan kemudahan wisman masuk,
 - 5) Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat, dan
 - 6) Jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata.
 - e. Percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi, dengan program prioritas :

- 1) Pengembangan kawasan industri/KEK,
- 2) Penumbuhan populasi industri,
- 3) Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif,
- 4) SDM industri yang kompeten dan disiplin,
- 5) Produktivitas dan daya saing industri,
- 6) Ketersediaan infrastruktur dan energi,
- 7) Ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri,
- 8) Hubungan industrial yang harmonis,
- 9) Pemberian insentif fiskal yang harmonis, dan
- 10) Pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif.

3. Pemerataan dan Kewilayahan, meliputi :

- a. Antar kelompok pendapatan, dengan program prioritas :
 - 1) Penciptaan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja,
 - 2) Perhatian khusus kepada usaha mikro, kecil dan koperasi,
 - 3) Pengembangan kewirausahaan,
 - 4) Perkuatan basis perekonomian pedesaan,
 - 5) Perluasan pelayanan dasar,
 - 6) Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan.
- b. Reforma agraria, dengan program prioritas :
 - 1) Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria,
 - 2) Penataan penugasan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria,
 - 3) Kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek reforma agraria,
 - 4) Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA, dan
 - 5) Kelembagaan pelaksanaan reforma agraria pusat dan daerah.
- c. Daerah perbatasan, dengan program prioritas :
 - 1) Pembangunan PLBN terpadu,
 - 2) Pembangunan 10 PKSN sebagai pusat pengembangan perbatasan negara,
 - 3) Membuka isolasi lokpri, peningkatan sarpras, peningkatan SDM dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku,
 - 4) Pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara, dan
 - 5) Peningkatan kualitas diplomasi, kerja sama sosial – ekonomi.
- d. Daerah tertinggal, dengan program prioritas :
 - 1) Prioritas pengembangan ekonomi lokal,
 - 2) Peningkatan aksesibilitas,
 - 3) Pemenuhan pelayanan dasar publik, dan
 - 4) Peningkatan SDM dan IPTEK.
- e. Desa dan kawasan perdesaan, dengan program prioritas :
 - 1) Pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan transmigrasi,
 - 2) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa di kawasan transmigrasi,

- 3) Pembangunan SDM, pemberdayaan dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi,
 - 4) Penguatan pemerintahan desa,
 - 5) Pengawasan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
 - 6) Pengembangan ekonomi kawasan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa – kota, dan
 - 7) Pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.
- f. Perkotaan, dengan program prioritas :
- 1) Mewujudkan sistem perkotaan,
 - 2) Pemenuhan standar pelayanan perkotaan,
 - 3) Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana,
 - 4) Mengembangkan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis TIK,
 - 5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota.
- g. Konektivitas, dengan program prioritas :
- 1) Pembangunan dan pengembangan transportasi laut,
 - 2) Pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah,
 - 3) Pembangunan dan pengembangan kapasitas bandara pengumpul dan pengumpan,
 - 4) Pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran,
 - 5) Pembangunan dan pengembangan transportasi perkotaan,
 - 6) Pembangunan dan pengembangan jaringan sabuk penyeberangan serta angkutan sungai dan danau (*interland waterway*),
 - 7) Pembangunan dan pengembangan transportasi umum massal perkotaan, dan
 - 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi.
4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, meliputi :
- a. Reformasi regulasi, kepastian dan penegakan hukum, terdiri dari :
- 1) Reformasi regulasi, dengan program prioritas :
 - a) Otonomi daerah,
 - b) Perizinan dan investasi, dan
 - c) Penataan ruang
 - 2) Kepastian dan penegakan hukum, dengan program prioritas :
 - a) Penegakan hukum yang berkualitas,
 - b) Pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, dan
 - c) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas keadilan.
- b. Stabilitas keamanan dan ketertiban, dengan program prioritas :
- 1) Deteksi dini dan bebas ancaman terorisme,
 - 2) Keselamatan dan keamanan laut yang terkendali,
 - 3) Lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba,
 - 4) Pelayanan prima kepolisian,
 - 5) Postur pertahanan berdaya gempur tinggi dan wilayah perbatasan yang aman, dan

- 6) Keamanan data dan informasi.
 - c. Konsolidasi demokrasi dan efektivitas diplomasi, dengan program prioritas :
 - 1) Penguatan lembaga demokrasi,
 - 2) Peningkatan akses dan kualitas informasi publik,
 - 3) Pemenuhan kebebasan sipil dan hak – hak politik,
 - 4) Pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme,
 - 5) Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan,
 - 6) Perlindungan WNI/BHI di luar negeri,
 - 7) Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan,
 - 8) Pemantapan peran di ASEAN, dan
 - 9) Penguatan diplomasi soft power.
 - d. Reformasi birokrasi, dengan program prioritas :
 - 1) Pelaksanaan road map reformasi birokrasi 2015 – 2019.
 - 2) Penerapan standar pelayanan publik dan sistem informasi perijinan, dan
 - 3) Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan.
5. Pembangunan Ekonomi, meliputi :
- a. Perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, dengan program prioritas :
 - 1) Peningkatan kemudahan berusaha,
 - 2) Pelaksana deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah,
 - 3) Pengembangan layanan perizinan terpadu,
 - 4) Peningkatan persaingan usaha yang sehat,
 - 5) Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi,
 - 6) Pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang harmonis,
 - 7) Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis.
 - b. Peningkatan ekspor non migas, terdiri dari :
 - 1) Sisi produksi, dengan program prioritas :
 - a) Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor,
 - b) Peningkatan realisasi investasi berorientasi ekspor,
 - c) Peningkatan ekspor produk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah,
 - d) Pengembangan industri pengolah sumber daya alam berorientasi ekspor,
 - 2) Sisi permintaan, dengan program prioritas :
 - a) Pengembangan fasilitas ekspor,
 - b) Peningkatan efektivitas kerjasama perdagangan internasional,
 - c) Penguatan market intelligence, promosi, dan asistensi ekspor.
 - c. Reformasi fiskal, terdiri dari :
 - 1) Pengoptimalan pendapatan negara, dengan program prioritas :
 - a) Pengoptimalan perpajakan,
 - b) Dukungan regulasi,
 - c) Pengoptimalan PNBP, dan

- d) Penguatan institusi
- 2) Peningkatan kualitas belanja negara, dengan program prioritas :
 - a) Perbaikan pelaksana anggaran
 - b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif,
 - c) Peningkatan efektivitas dan efisiensi transfer ke daerah dan dana desa, dan
 - d) Belanja subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran.

NO	Priorita Pembangunan Nasional Tahun 2017	Prioritas Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2017
1	Tata Kelola Reformasi Birokrasi	Peningkatan Pelayanan Publik
2	Antar Kelompok Pendapatan	Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
3	Antar Wilayah (1) Desa (2) Perbatasan (3) Tertinggal (perkotaan)	Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
4	Kepastian dan Penegakan Hukum	Peningkatan Pelayanan Publik
5	Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan
6	Kesehatan	Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
7	Perumahan	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman Kota
8	Kedaulatan Pangan	Pengurangan Ketimpangan Ekonomi dan Perluasan Kesempatan Kerja
9	Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan	Pembangunan Energi dan Telematika Jakarta
10	Kemaritiman dan Kelautan	Pengembangan Sistem Transportasi
11	Pariwisata dan Industri	Pembangunan Budaya Multi - Kultur
12	Revolusi Mental	Pembangunan Budaya Multi Kultur
13	Politik dan Demokrasi	Peningkatan Kapasitas Aparatur